



Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Way Kanan (Studi Pada Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Baradatu Tahun 2023)

Asep Setiawan^{1✉}, Nur Islam², Tia Marlinda Sari³

Universitas Muhammadiyah Lampung

Email: sasep6986@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penurunan angka partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilu di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, sedangkan jumlah penduduk meningkat. Menurunnya partisipasi dikarenakan kurangnya pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat. Sehingga para stakeholder, sekolah, partai politik, media massa dan lainnya perlu melakukan pendidikan politik yang lebih masif lagi sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan peranan serta faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan dalam melakukan pendidikan politik telah melaksanakan program KPU Mengajar, program ini dilakukan dengan cara memberikan materi tentang pengetahuan politik dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilu. Sehingga dengan adanya program ini dapat menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Namun program KPU mengajar ini belum dilakukan secara menyeluruh / merata di lembaga-lembaga pendidikan yang ada, dikarenakan keterbatasan waktu dan dana yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut selain melaksanakan program KPU mengajar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan juga melakukan sosialisasi melalui media sosial.

Kata Kunci: *Peranan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pendidikan Politik, Pemilih Pemula*

Abstract

The decline in the number of political participation of first-time voters in the elections in Gunung Labuhan District and Baradatu District, Way Kanan Regency, while the population increased. The decline in participation is due to the lack of political education received by the community. So stakeholders, schools, political parties, mass media and others need to carry out more massive political education so that they can increase voter participation. The aim of this research is to describe the role and supporting and inhibiting factors of the General Election Commission in political education for novice voters in Gunung Labuhan District and Baradatu District, Way Kanan Regency. This research uses a qualitative research type with a qualitative descriptive approach. The role of the Way Kanan Regency General Election Commission (KPU) in conducting political education has implemented the Teaching KPU program, this program is carried out by providing material about political knowledge and knowledge about organizing elections. So that this program can raise awareness and increase the participation of first-time voters in the 2024 General Election and Pilkada. However, this KPU teaching program has not been implemented comprehensively/evenly in existing educational institutions, due to limited time and funds needed to provide field. To overcome this, apart from implementing the KPU teaching program, the General Election Commission (KPU) of Way Kanan Regency also carried out outreach via social media.

Keywords: Role, General Election Commission (KPU), Political Education, New Voters

PENDAHULUAN

Pemilihan umum adalah institusi krusial dalam setiap negara demokrasi, khususnya bagi negara republik seperti Indonesia. Institusi ini berperan untuk memenuhi tiga prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan, serta mencegah dominasi kepentingan spesifik dalam pemerintahan atau peralihan dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan elit.

Agar kedaulatan rakyat tercapai dan pemerintahan yang demokratis terbentuk, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan satu-satunya badan yang memiliki kewenangan untuk mengatur Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, serta pemilihan kepala daerah di Indonesia. KPU adalah salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas semua aspek penyelenggaraan pemilu (Syauqi. 2020:22).

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan tanda implementasi kedaulatan rakyat yang sah, yang tercermin dalam keterlibatan mereka dalam proses demokratis seperti Pemilu. Tingkat partisipasi politik yang tinggi menunjukkan bahwa rakyat aktif dan terlibat dalam urusan kenegaraan, sementara partisipasi yang rendah mengindikasikan kurangnya

minat terhadap masalah politik. Ketidakterlibatan ini bisa tercermin dalam golongan putih pada pemilu.

Pendidikan politik merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi politik dengan memberikan pengetahuan, kesadaran, nilai-nilai, sikap, dan orientasi politik kepada warga negara. Ini dilakukan melalui sosialisasi politik yang dilakukan oleh berbagai agen mulai dari keluarga, sekolah, hingga media massa seperti televisi, koran, dan radio. Keterlibatan dalam kegiatan politik perlu memperhatikan segmentasi pemilih, termasuk pemilih pemula yang jumlahnya signifikan.

Di Kabupaten Way Kanan, terlihat tren penurunan partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Meskipun ada variasi dalam jumlah pemilih yang menggunakan hak suara mereka dan yang tidak, secara keseluruhan terdapat fluktuasi yang menunjukkan tantangan dalam mempertahankan tingkat partisipasi pemilih selama setiap pemilihan umum, seperti data berikut ini:

Tabel. 1 Partisipasi Pemilih Kabupaten Way Kanan

No	Tahun	DPT	Kategori	Jumlah	%
1	2019	344152	Partisipasi Pemilih	301221	88%
			Partisipasi Non Pemilih	42931	12%
2	2023	346258	Partisipasi Pemilih	290111	84%
			Partisipasi Non Pemilih	56147	16%

Sumber: Dokumentasi Data KPU 2023 Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan Tabel 1, dapat dipahami bahwa dalam Pemilihan Umum Presiden di KPU Kabupaten Way Kanan periode 2019, rata-rata partisipasi pemilih mencapai 88%, sementara partisipasi non-pemilih sebesar 12%. Pada data terbaru tahun 2023 untuk Pemilihan Umum Presiden periode 2024, rata-rata partisipasi pemilih turun menjadi 84%, dengan partisipasi non-pemilih meningkat menjadi 16%. Data terbaru tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih untuk pemilu 2024 lebih rendah dibandingkan dengan pemilu nasional tahun 2019.

Pemilih pemula di Kecamatan Gunung Labuhan terdiri dari sekitar 1.211 individu yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilih mereka. Komposisi jenis kelamin pemilih pemula di kecamatan ini adalah 52% laki-laki dan 48% perempuan. Secara demografis, 30% dari pemilih pemula berusia 17 tahun, 45% berusia antara 18-19 tahun, dan 25% berusia antara 20-21 tahun. Tingkat partisipasi dalam simulasi pemilu mencapai 75%, menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi. Kesadaran politik di kalangan pemilih pemula ini juga tergolong tinggi dengan 80% dari mereka aktif mengikuti berita politik. Preferensi politik

mereka cenderung kepada calon dengan latar belakang pendidikan tinggi dan program pembangunan berkelanjutan (60%), serta calon yang fokus pada isu lokal seperti perbaikan infrastruktur (30%).

Di Kecamatan Baradatu, terdapat sekitar 1.534 pemilih pemula, dengan komposisi jenis kelamin yang seimbang yaitu 50% laki-laki dan 50% perempuan. Demografi umur menunjukkan bahwa 35% berusia 17 tahun, 40% berusia 18-19 tahun, dan 25% berusia 20-21 tahun. Tingkat partisipasi dalam simulasi pemilu sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Kecamatan Gunung Labuhan, yaitu 70%. Kesadaran politik di kalangan pemilih pemula di Baradatu cukup sedang, dengan 65% dari mereka secara aktif mengikuti berita politik. Preferensi politik di kecamatan ini menunjukkan bahwa 55% pemilih pemula lebih memilih calon yang berfokus pada lapangan kerja dan ekonomi, sementara 35% tertarik pada calon yang memiliki program kesehatan dan pendidikan. Tantangan yang dihadapi di kedua kecamatan ini mencakup akses informasi yang terbatas dan pengaruh kuat dari lingkungan terhadap pilihan politik pemilih pemula.

Selanjutnya Dari data pemilih Tetap KPU Kabupaten Way Kanan di temukan pula data Pemilih Pemula dari Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Pemilih Pemula Kecamatan Gunung Labuhan dan
Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan 2023

Tahun	Kecamatan	DPT	Jumlah Pemilih Pemula	%
2019	Gunung Labuhan	20211	1557	7,70%
	Baradatu	31010	1570	5,06%
	Jumlah	51221	3127	6,10%
2023	Gunung Labuhan	22241	1211	5,40%
	Baradatu	32020	1534	4,80%
	Jumlah	54261	2745	5,10%

Sumber: Dokumentasi Data KPU 2023 Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa jumlah pemilih pemula di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2019 adalah 3127 orang, dengan persentase sebesar 6,10%. Pada tahun 2023, jumlah pemilih pemula di kedua kecamatan tersebut menurun menjadi 2.745 orang, dengan persentase sebesar 5,1%. Penurunan ini mengharuskan pihak terkait untuk melakukan upaya yang lebih intensif dalam memberikan edukasi tentang pemilu kepada pemilih pemula di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan.

Melihat turunnya partisipasi politik dalam pemilu di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, pihak-pihak yang terlibat perlu meningkatkan upaya pendidikan politik secara lebih intensif. Sekolah, partai politik, media massa, dan entitas lainnya diharapkan dapat meningkatkan kontribusi mereka dalam menyampaikan pendidikan politik kepada masyarakat. Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Way Kanan telah melaksanakan program pendidikan politik khusus untuk pemilih pemula. Dari perspektif akademis, pendidikan politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Way Kanan bisa dibandingkan dengan berbagai konsep pendidikan politik yang diusulkan oleh para ahli, sehingga dapat dipelajari lebih mendalam dan komprehensif mengenai konsep serta implementasinya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian tentang “Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Way Kanan (Studi Pada Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Gunung Labuhan Tahun 2023)”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mengadopsi pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif umumnya diterapkan dalam studi mengenai kehidupan masyarakat, sejarah, perilaku, fungsi organisasi, aktivitas sosial, dan berbagai bidang lainnya. Bogdan dan Taylor (dalam Wiranta S 2020) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif melibatkan proses pengumpulan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan serta perilaku dari individu yang menjadi subjek penelitian. Hal yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu:

1. Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Kesadaran Politik Pemilih Pemula oleh KPU;
2. Tantangan dan Hambatan dalam Pendidikan Politik di Kecamatan Gunung Labuhan dan Baradatu.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari objek yang sedang diteliti. Data primer ini didapatkan melalui observasi di lapangan dan wawancara langsung dengan informan.
2. Data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data primer, yang diperoleh dari sumber lain atau dokumen yang tersedia. Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan sebelumnya diperoleh dari observasi serta berbagai laporan dan dokumentasi seperti artikel, dokumen kantor, foto, dan materi tertulis lainnya yang relevan untuk mendukung penelitian ini.

Dalam penelitian kualitatif, informan atau manusia yang dijadikan sumber informasi haruslah sesuai kriteria tertentu agar fokus masalah yang dicari dapat dipecahkan dan ditemukan. Dalam proses menggali informasi atau mengamati oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan keabsahan data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini (Sugiono 2015):

- 1) Sehat jasmani dan rohani,
- 2) Memiliki pengetahuan terkait objek pertanyaan,
- 3) Merasakan pengalaman secara langsung di tempat penelitian,
- 4) Mau dan bersedia menjadi informan penelitian,

Berdasarkan Kriteria tersebut di atas yang menjadi informan penelitian ini adalah:

- 1) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan
- 2) Pemilih Pemula di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Baradatu

Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menghimpun informasi kuantitatif dari responden sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Metode pengumpulan data dalam studi ini mencakup beberapa teknik, yakni:

1. Observasi, yang menurut Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2018:203), merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara langsung untuk memahami peran Komisi Pemilihan Umum dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Way Kanan.
2. Wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data secara lisan, sebagaimana dijelaskan oleh Wiranta.S (2020:74). Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan Ketua KPU dan masyarakat terkait peran Komisi Pemilihan Umum dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kabupaten Way Kanan. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan mendalam untuk memperoleh data yang valid dan terperinci.
3. Dokumentasi merujuk pada bukti konkret yang digunakan untuk memperoleh data sekunder. Dokumentasi dilakukan dengan meninjau data dari dokumen pribadi dan dokumen resmi, baik dalam bentuk visual maupun tulisan, yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis dan interaktif dari Miles dan Huberman (2017), yakni sebagai berikut:

1. Reduksi data mengacu pada proses merangkum informasi, memilih hal-hal inti, dan memfokuskan pada aspek penting serta mencari pola atau tema dari data yang ada.

2. Penyajian data melibatkan cara menyampaikan informasi, baik dalam bentuk narasi singkat, grafik, hubungan antar kategori, dan format lainnya.
3. Penarikan kesimpulan melibatkan deskripsi atau verifikasi data yang kemudian diinterpretasikan dalam narasi kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan tentang makna yang muncul dari data tersebut.

Salah satu metode yang digunakan oleh peneliti untuk memastikan keandalan data adalah triangulasi, khususnya triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan memeriksa data dari beberapa sumber berbeda untuk memverifikasi kebenaran data yang telah diperoleh, dengan memperhatikan posisi dan kepentingan masing-masing informan. Lokasi penelitian berada di Kantor KPU Kabupaten Way Kanan. Peneliti memilih lokasi ini karena merupakan tempat kelahiran penulis, sehingga memudahkan dalam pengambilan data dan aksesibilitas penelitian dari segi tenaga, dana, dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KPU adalah salah satu lembaga negara yang memiliki independensi. Lembaga independen di Indonesia merujuk pada lembaga yang dibentuk oleh pemerintah pusat tetapi beroperasi secara mandiri. Menurut Iswandi dan Prasetyoningsih (2020:77), KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam pelaksanaan tugasnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (8) menjelaskan hal ini, serta mengatur mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemilu dan Pilkada di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam melaksanakan pendidikan politik. Salah satu fungsi KPU adalah melakukan sosialisasi kepada pemilih terkait tugas dan wewenang KPU serta proses pemilu. Sosialisasi ini sangat penting bagi pemilih pemula yang jumlahnya sekitar 20% dari total pemilih. Partisipasi pemilih dalam pemilu akan ditingkatkan oleh pemilih pemula yang memiliki pengetahuan politik yang baik (politik literacy), yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peranan krusial dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat ditekankan terkait peran KPU dalam hal ini:

1. Penginformasian yang Akurat: KPU bertugas untuk menyampaikan informasi yang tepat dan obyektif mengenai proses pemilihan umum, partai politik, kandidat, serta

- isu-isu politik krusial. Hal ini penting untuk membantu pemilih pemula memahami perbedaan antara partai politik, visi misi kandidat, dan kebijakan yang mereka usung.
2. Pelatihan dan Pendidikan: KPU mengadakan berbagai kegiatan pelatihan dan edukasi langsung kepada pemilih pemula, seperti seminar, lokakarya, dan kampanye sosialisasi di sekolah, kampus, dan komunitas. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang proses pemilihan, hak serta kewajiban pemilih, dan pentingnya aktif berpartisipasi dalam demokrasi.
 3. Penyediaan Materi Pendidikan: KPU menyediakan bahan-bahan pendidikan seperti buku, brosur, leaflet, dan materi online yang dapat diakses oleh masyarakat umum, terutama pemilih pemula. Materi ini mencakup panduan cara memilih, penjelasan mengenai prosedur pencoblosan, dan informasi teknis lainnya terkait pemilu.
 4. Mendorong Partisipasi Pemilih**: KPU tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif pemilih, termasuk pemilih pemula, dalam pemilu. Mereka mendorong pendaftaran sebagai pemilih, kunjungan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan memberikan suara dengan aktif.
 5. Mengatasi Ketidak fahaman dan Ketakutan: KPU membantu mengatasi ketidak fahaman dan ketakutan pemilih pemula terhadap proses politik dengan memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh tentang apa yang dapat diharapkan selama pemilihan dan bagaimana mereka dapat berpartisipasi dengan aman.
 6. Pendekatan Inklusif: KPU berkomitmen untuk pendekatan inklusif yang memperhatikan keberagaman sosial, budaya, dan bahasa di masyarakat Indonesia. Mereka memastikan semua kelompok, termasuk pemilih pemula dari latar belakang yang beragam, menerima pendidikan politik yang relevan dan dapat diakses.
 7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan: Setelah setiap pemilihan, KPU melakukan evaluasi terhadap program pendidikan politik mereka untuk meningkatkan efektivitas dan metode pendekatan dalam mendidik pemilih pemula.

Dengan semua peran ini, KPU bukan hanya penyelenggara pemilu tetapi juga mitra penting dalam membangun budaya politik yang sehat dan partisipatif di Indonesia, khususnya di kalangan generasi muda dan pemilih pemula.

Pada hasil penelitian ini, dalam melakukan upaya peningkatan partisipasi pemilih pemula Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan melakukan pendidikan politik, dengan berbagai program yang disusun secara nasional dan program yang ada ditingkat kabupaten, salah satunya yaitu program KPU mengajar. Program KPU mengajar adalah kegiatan yang melakukan pendidikan politik sejak dini kepada peserta didik baik ditingkat SD, SMP maupun SMA. Program ini dilakukan untuk mengenalkan politik sejak

dini kepada siswa-siswi yang ada di Kabupaten Way Kanan, sehingga dapat menumbuhkan kesadaran politik bagi pemilih pemula.

Dalam melaksanakan program KPU Mengajar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan tidak hanya bekerja sendiri, namun berkolaborasi atau bekerjasama dengan berbagai pihak yaitu:

1. *Stakeholder*/ pemerintah, unsur pemerintahan ini sangat membantu baik dalam sisi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Media, media merupakan unsur yang penting dalam membantu peningkatan partisipasi pemilih terutama pemilih pemula. Media yang digunakan ada media online maupun media konvensional.
3. Organisasi Masyarakat (ORMAS) dan lembaga kemasyarakatan, kedua pihak ini memberikan pengaruh dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi pemilih pemula.

Meskipun program KPU mengajar ini dinilai baik dan efektif oleh pemilih pemula, namun dalam pelaksanaan program pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan belum dilaksanakan secara merata atau menyeluruh di lembaga pendidikan yang ada, sehingga masih banyak pemilih pemula yang tidak peduli dengan politik. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu:

1. Banyaknya jumlah pemilih pemula yang ada di Kabupaten Way Kanan, sehingga memerlukan banyak waktu untuk melakukan program KPU mengajar di lembaga pendidikan yang ada di lingkup Kabupaten Way Kanan.
2. Biaya/ dana, dengan luasnya wilayah Kabupaten Way Kanan ini tentunya juga membutuhkan biaya/ dana yang banyak ketika akan melakukan program KPU Mengajar di lembaga-lembaga pendidikan.

Menurunnya partisipasi pemilih pemula di Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan disebabkan karena kurangnya pengetahuan politik pada pemilih pemula, sehingga menganggap politik adalah suatu hal yang menakutkan. Melalui program KPU Mengajar yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Way Kanan, dengan cara memberikan materi mengenai Kepemiluan di lembaga-lembaga pendidikan, bisa menambah pengetahuan siswa-siswi mengenai tahapan-tahapan Pemilu serta tugas dan fungsi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri. Karena pengetahuan ini, merupakan hal baru yang diterima oleh siswa-siswi namun tetap menyenangkan dan dapat merubah *mindset* pemilih pemula bahwa politik itu bukan hal yang menakutkan dan menegangkan, tetapi politik itu menyenangkan.

Program KPU Mengajar ini, menurut perwakilan pemilih pemula yang ada di Kecamatan Baradatu dan Kecamatan Gunung Labuhan Kabupaten Way Kanan

merupakan program yang sangat menarik dan efektif dalam meningkatkan pengetahuan mengenai politik dan Pemilu. Hal ini dikarenakan penyampaian materinya sesuai dengan yang seharusnya disampaikan atau disosialisasikan kepada pemilih pemula dan mudah dipahami.

Dengan adanya program KPU mengajar diharapkan bisa meningkatkan pengetahuan pemilih pemula bidang politik dan kepemiluan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Bentuk partisipasi yang dimaksud adalah para pemilih pemula ikut hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya, karena satu suara dari pemilih pemula sangat berarti demi terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang sukses.

SIMPULAN

Merujuk dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan dalam memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula yaitu melalui program KPU mengajar dan sosialisasi. Hal utama yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Way Kanan yaitu melalui program KPU Mengajar. Program KPU Mengajar ini, merupakan program yang efektif dilakukan oleh KPU Kabupaten Way Kanan, dalam rangka memberikan pengetahuan politik dan pengetahuan penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada kepada siswa-siswi yang nantinya akan masuk dalam kriteria pemilih pemula. Melalui program ini, harapannya bisa menumbuhkan kesadaran politik bagi pemilih pemula dengan cara mereka datang atau hadir ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilihnya demi terlaksananya Pemilu yang sukses.

Namun program KPU mengajar ini belum dilakukan secara menyeluruh / merata di lembaga-lembaga pendidikan di Kabupaten Way Kanan, dikarenakan keterbatasan waktu dan dana yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut selain melaksanakan program KPU mengajar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan juga melakukan sosialisasi melalui media sosial yang informasinya bisa terjangkau secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Husein, Harun. 2014. "Pemilu Indonesia." *Jakarta: Perludem*.
- Huda, Nimatul. 2017. *Penataan Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Kencana.
- Perdana, Aditya, Pramono U Tanthowi, and Mada Sukmajati. 2019. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*. Komisi Pemilihan Umum, Republik Indonesia.

- Sundari, Lusi, Alfiandra Alfiandra, and Sri Artati Waluyati. 2014. "Partisipasi Politik Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Dusun III Desa Segayam Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim." *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKn* 1 (1).
- Susetyo, Benny. 2005. *Politik Pendidikan Penguasa*. LKIS Pelangi Aksara.
- Sutami, Hermina. 2014. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa; Edisi Keempat." *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* 11 (2).
- Sutrisman, Dudih. 2019. *Pendidikan Politik, Persepsi, Kepemimpinan, Dan Mahasiswa*. Guepedia.
- Aurelia, Sylvania Okta, Alvi Septia Listyani, Aisyah Nabila Ramandhani, and Syaefwanda Agita Saputri. 2024. "Dinamika Lembaga Independen Dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Nusantara* 1 (4): 130–40.
- Burhanuddin, Burhanuddin. 2017. "Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Dalam Menjalankan Keputusan Rapat Dengar Pendapat Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia." *Jatiswara* 32 (3).
- Eddyono, Luthfi Widagdo. 2010. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 7 (3): 1–48.
- Iswandi, Kelik, and Nanik Prasetyoningsih. 2020. "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Independen Di Indonesia." *SAS/26* (4): 434–46.
- Lesang, Indra, and Rumaila Daiyan. 2023. "Peran KPU Pulau Morotai Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Masyarakat Pada Pemilu Serentak." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9 (1): 669–80.
- Nurdin, Putri Handayani. 2019. "Politik Hukum Pengaturan Pendidikan Politik Oleh Partai Politik." *Jambura Law Review* 1 (2): 144–66.
- Nuraini, A. R. (2024). *Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilu Serentak Di Tahun 2024* (Doctoral dissertation, S1 Hukum Tata Negara Islam IAIN SNJ).
- Nursukma, S., & Setiawan, R. (2024). Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 289-296.
- Putra, A. E. (2024). *Hubungan Fungsional Antara Komisi Pemilihan Umum dengan Badan Pengawas Pemilu dalam Verifikasi Partai Peserta Pemilu* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Pahlevi, Moch Edward Trias, and Azka Abdi Amrurobbi. 2020. "Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa." *Integritas: Jurnal*

Antikorupsi 6 (1): 141–52.

Rismawati, Rismawati, and Mardiana Mardiana. 2018. "Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemili Pemula Di Kabupaten Gowa." *JED (Jurnal Etika Demokrasi)* 3 (2).

Rosyad, Ali Miftakhu, and Muhammad Anas Maarif. 2020. "Paradigma Pendidikan Demokrasi Dan Pendidikan Islam Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Indonesia." *Nazhruna: Jurnal Pendidikan Islam* 3 (1): 75–99.

Santoso, Rudi. 2019. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Mewujudkan Demokrasi Berintegritas." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7 (02): 252–61.

Syauqi, Achmad Diyan. 2020. ""Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Terhadap Pemilu Untuk Kedaulatan Rakyat Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Kabupaten Bondowoso Tahun 2019)." Fakultas Syari'ah Hukum Islam Program Studi Hukum Tata Negara.

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Di akses pada tanggal 5 Juni 2024)

Undang-undang (UU) Republik Idonesia Nomor 7 Tahun 207 tentang Pemilihan Umum (Di akses pada tanggal 5 Juni 2024).